

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

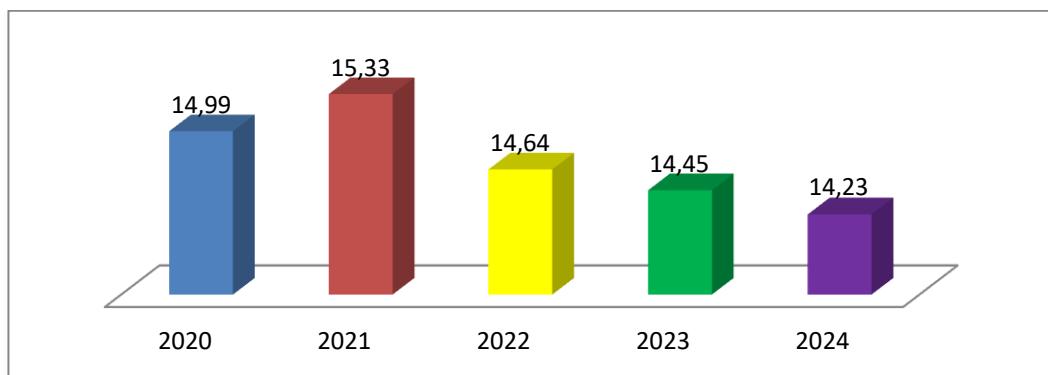
Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan sebagai keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga, baik dalam hal uang, pengetahuan, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha, dan bekerja. Ini mencakup ketidakmampuan, kebebasan, aset, dan aksesibilitas untuk kebutuhan masa depan, serta kerentanan terhadap risiko dan tekanan, seperti penyakit dan peningkatan harga bahan pokok serta pendidikan (Gimun, *et.al*, 2024).

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Maret 2024 sebesar 804,53 ribu orang (14,23 persen), turun dibanding Maret 2023 yang sebesar 806,75 ribu orang (14,45 persen). (Profil Kemiskinan Provinsi Aceh, 2024). Selama periode Maret 2023-Maret 2024, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 1,39 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 3,58 ribu orang. Pola perubahan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan pola perubahan persentase penduduk miskin, dan memiliki arah yang sama dimana daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan persentase penduduk miskinnya. Penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,17 persen (Profil Kemiskinan Provinsi Aceh, 2024).

Menurut Setiadi dan Kholid (2011) beberapa macam ukuran yang sering kali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain tingkat konsumsi beras

per tahun, tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan masyarakat dan indeks kemiskinan manusia. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan.

Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota ternyata tidak lepas dari kemiskinan, salah satu Kabupaten mempunyai masalah kemiskinan yang cukup kompleks yaitu Kabupaten Aceh Singkil selama periode 2020-2024 menjadi daerah paling besar persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh dibandingkan dengan 22 kabupaten/kota di Provinsi Aceh lainnya (BPS Aceh, 2025). Hal ini terjadi karena Kabupaten Aceh Singkil merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 10 April 2002 dan pada tanggal 2 Januari 2007 Kabupaten Aceh Singkil terjadi pemekaran lagi dengan Kota Subulussalam sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut masih rendah. Adapun tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2020-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025.

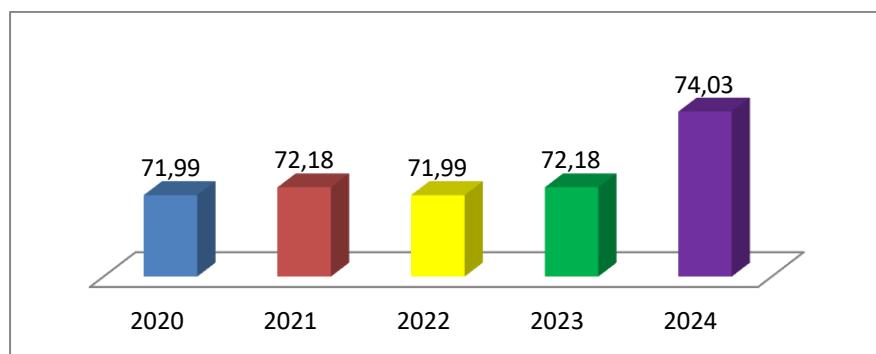
Berdasarkan data tingkat kemiskinan, dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 0,34% dari tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan *lockdown* pandemi Covid 19 yang membatasi masyarakat untuk bekerja di luar rumah. Tahun 2022 tingkat kemiskinan menurun 0,69% dari tahun 2021, tahun 2023, dan tahun 2024 masing-masing menurun 0,19% dan 0,22% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dapat diturunkan secara bertahap.

Faktor-faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan satu sama lain saling terkait dimana kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial. Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi.. IPM berfungsi memberikan tuntunan dalam perencanaan pembangunan,

membantu menentukan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran yang sesuai (Gimun, *et.al.*, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan pencapaian pembangunan manusia yang diukur melalui tiga komponen keberhasilan yaitu, mendapatkan kehidupan yang sehat (*longevity*), memiliki standar kehidupan yang layak (*living standards*), dan memperoleh atau menguasai pengetahuan (*knowledge*). Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dapat diukur melalui angka harapan hidup, untuk standar kehidupan yang layak biasanya diukur dengan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dalam mendapatkan pengetahuan, normalnya diukur dengan melihat rata-rata lama sekolah (Yektiningsih, 2018). Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 (Persen)

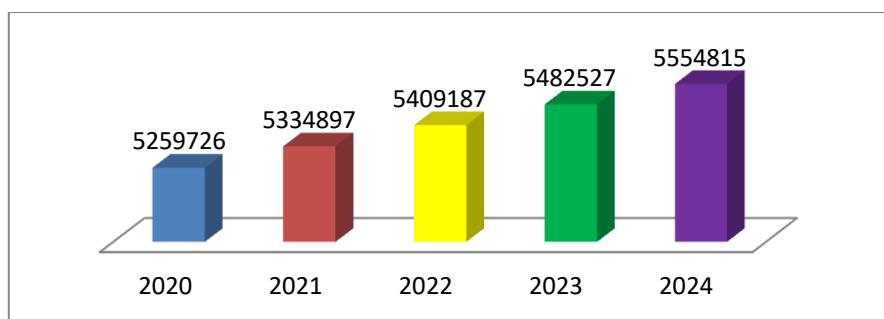
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh periode 2020-2024, dapat diketahui bahwa tahun 2021 IPM meningkat 0,19% dari tahun 2020, tahun 2022 menurun 0,19%, tahun 2023 meningkat 0,19%, dan tahun 2024 meningkat 1,85%, dari tahun 2023. Menurunnya IPM pada tahun 2022

dikarenakan pada tahun tersebut tingkat kemiskinan sangat tinggi dan juga faktor ekonomi, seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah (BPS Aceh, 2025).

Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran. Berkurangnya pengangguran dan bertambahnya tingkat pendapatan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu peningkatan kualitas manusia harus terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemudian jumlah penduduk juga memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020-2024. Nelson dan Leibstein dalam Arsyad (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Adapun jumlah penduduk di Provinsi Aceh periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.3 berikut:

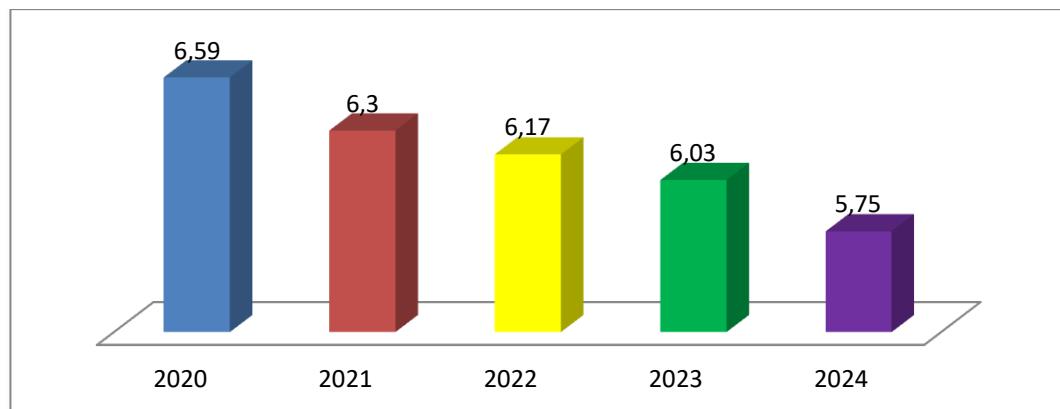


Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025.

Berdasarkan data jumlah penduduk, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tahun 2021 meningkat 1,43% dari tahun 2020, tahun 2022 meningkat 1,39%, tahun 2023 meningkat 1,36%, tahun 2024 meningkat 1,32% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk secara terus menerus disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari angka kematian, dan juga faktor migrasi.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Artinya, pengangguran terbuka adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya pada tingkat upah dan harga yang sedang (Ashari dan Athoillah, 2023). Adapun tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh periode 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 1.4 berikut:



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 menurun 0,29% dari tahun 2020, tahun 2022 menurun 0.13%, tahun 2023 menurun 0,14%, tahun 2024 menurun 0,23% dari tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka secara terus menerus disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan investasi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja di Provinsi Aceh (BPS Aceh, 2025).

Hasil penelitian Matondang, *et.al* (2024) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Hail penelitian Gimun, *et.al* (2024) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ashari dan Athoillah (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini seperti jumlah variabel yang digunakan, tahun pengamatan, dan lokasi penelitian. Diantara beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dewanti and Sishadiyati (2024). Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin menguji kembali tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah**

Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.

4. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Dapat memberi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada pembaca dan masyarakat banyak.
3. Dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh.